



Ekonomi Islam di Mata Ekonom Non-Muslim: Telaah Pemikiran John R. Presley

Ahmad Ubaidillah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan

Email: ubaidmad@yahoo.com

Abstract: *This paper aims to examine Islamic economic thought from non-Muslim economist, John R. Presley. This research is a library research, which is a research process that reviews literature and analyzes relevant topics. In collecting data, the author utilizes journals, books, dictionaries, magazines, and other library sources. The analytical method used in this study is the hermeneutic method, which is interpreting, explaining, interpreting, and translating these data sources. The results of the study indicate that Islamic economics, according to Presley, can be a useful field of dialogue between the Islamic world and the West. A broader appreciation of Islamic economics will not only increase the Western world's understanding of how the Muslim economy operates, but also offer an interesting perspective on many Western economic principles. In addition, according to Presley, Islamic financial institutions, especially Islamic banks, as interest-free finance have developed surprisingly far. Interest-free banks have proven to be durable and enjoy substantial deposit growth. The impact of non-interest operationalization on the determination of foreign exchange rates and international capital flows, and the proper accounting definition of 'profit' to be shared with suppliers of capital are some of the serious issues that, according to Presley, practitioners and theorists of Islamic financial institutions must face.*

Keywords: *Islamic Economic Thought, John R. Presley, Non-Muslim Economist*

Pendahuluan

Banyak ekonom non-Muslim di Barat, sebagaimana dikatakan Alamsi, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perdebatan tentang berbagai isu dalam ekonomi Islam. Namun, Eropa, bukan Amerika, telah menghasilkan komentator yang menunjukkan sikap lebih simpatik terhadap keinginan para pendukung disiplin ini untuk mengembangkannya berdasarkan paradigma Islam.¹

Memang, partisipasi sarjana non-Muslim yang kadang-kadang menciptakan bias yang melekat pada beberapa persepsi orientalis tentang ajaran dan perintah Islam dapat dengan mudah "ditularkan" kepada komentator Barat non-Muslim tentang ekonomi Islam. Dengan demikian, nilai kontribusi kritis mereka akan berkurang secara substansial sejauh mana bias

Alamsi, Adnan Mustafa-Sabri M.J. "Critiques of Islamic Economics An Assessment of Some Major Themes, ¹ with Special Focus on The Writings of Timur Kuran." *Disertasi* (Department of Theology School of Historical Studies The University of Birmingham, 1999), 41

tersebut disebarkan saat membentuk pandangan tentang ekonomi Islam yang sedang berkembang saat ini.²

Namun, komentator Barat tentang ekonomi Islam tidak serta-merta disesatkan oleh generasi orientalis sebelumnya yang meletakkan dasar bagi berbagai kesalahpahaman tentang sumber pengetahuan utama Islam. Karena bias dan keberpihakan dapat dilihat berasal langsung dari keinginan komentator tersebut untuk menyajikan gambaran ekonomi Islam yang menyimpang, sebagian dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa ekonomi Islam didasarkan pada pandangan dunia yang bertentangan dengan “nilai-nilai yang diterima secara universal”, atau bahkan mengancamnya.³ Dalam konteks ekonomi, “nilai-nilai yang diterima secara universal” ini bisa berwujud sistem ekonom konvensional, terutama kapitalisme.

Para pendukung skenario ini memandang kritik Barat terhadap ekonomi Islam sebagai gelombang baru neo-orientalisme. Dalam skenario ini, para neo-orientalis tidak hanya mengambil pemahaman bias dari “nenek moyang” mereka sebagai titik tolak, tetapi juga memperparah kesalahpahaman terhadap bidang studi baru ini melalui “penyuntingan” sumber-sumber sekunder, yaitu literatur kontemporer tentang ekonomi Islam untuk mendukung posisi yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti para orientalis yang dikritik oleh Edward Said, para skeptis bias orientalis memahami kritik orang luar terhadap ekonomi Islam sebagai pelanggaran terhadap dasar-dasar metodologi penelitian objektif untuk sampai pada beberapa kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴

John R. Presley, ekonom Barat non-Muslim, yang bisa dikatakan neo-orientalis ini, percaya bahwa ekonomi Islam dapat menjadi ladang dialog yang bermanfaat antara dunia Islam dan Barat. Presley menyayangkan bahwa munculnya ekonomi Islam sebagai paradigma baru dalam ekonomi telah disambut dengan ketidakpedulian yang meluas oleh banyak ekonom Barat. Apresiasi yang lebih luas terhadap ekonomi Islam tidak hanya akan meningkatkan pemahaman dunia Barat tentang bagaimana perekonomian umat Islam Muslim beroperasi, tetapi juga menawarkan perspektif yang menarik tentang banyak prinsip ekonomi Barat yang diterima.⁵

Penelitian ekonomi Islam dari perspektif ekonom non-Muslim membantu memperluas pemahaman lintas budaya tentang etika ekonomi dan kesejahteraan. Prinsip seperti pelarangan riba dan pengenaan zakat sering kali sejalan dengan konsep keadilan di Barat dan memberikan titik temu meskipun ada perbedaan prinsip. Perspektif ini mengundang dialog filosofis tentang kesejahteraan ekonomi dalam konteks budaya yang berbeda. Selain itu, perbedaan tersebut menciptakan tantangan dalam penerapan ekonomi Islam, sekaligus membuka peluang bagi inovasi dan penerimaan global yang lebih luas.⁶ Tulisan ini akan memaparkan pemikiran ekonomi Islam Presley tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu proses penelitian yang dengan meninjau literatur dan menganalisis topik yang relevan. Dalam pengumpulan data, penulis memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, majalah, dan sumber-sumber lain. Metode

Alamasi, Adnan Mustafa-Sabri M.J. “Critiques of Islamic Economics“, 7.²

Alamasi, Adnan Mustafa-Sabri M.J. “Critiques of Islamic Economics“, 7.³

Alamasi, Adnan Mustafa-Sabri M.J. “Critiques of Islamic Economics“, 44⁴

John R. Presley and John G. Sessions. “Islamic Economics: The Emergence of A New Paradigm.” *The Economic Journal* Vol. 104, No. 424 (May, 1994), 585

Abdul Chamid. “Ekonomi Islam Ddalam Pandangan Masyarakat Non Muslim: Tinjauan Epistemologi, Teologis⁶ dan Empiris.” *Jurnal Bisnis Net* Volume: 7, No. 2 Desember, (2024), 430.

analisis yang digunakan adalah hermeneutika, yang bertugas menginterpretasikan, menjelaskan, menafsirkan, dan menerjemahkan.⁷ Metode ini digunakan untuk memahami beragam teks yang dipakai dalam penelitian. Hermeneutika juga berarti memahami makna sebuah teks sebagai sebuah struktur sosial yang muncul secara interaktif. Artinya, hermeneutika merupakan prosedur interpretatif untuk menguak realitas sosial dalam teks. Dengan demikian, tujuan utama metode hermeneutika berusaha membongkar struktur interaksi dalam teks.⁸ Teks yang dikuak adalah tulisan John R. Presley tentang ekonomi dan keuangan Islam.

Hasil dan Pembahasan

Biografi dan Karya John R. Presley

John R. Presley adalah Profesor Ekonomi dari tahun 1984 hingga 2004 saat ia diangkat sebagai profesor Emeritus. Presley memulai karier akademisnya di Universitas Teknologi Loughborough, Inggris, pada Desember 1968 sebagai dosen gabungan antara Ilmu Sosial dan Teknik Industri/Departemen Manajemen. Pada 1976 ia menjadi dosen senior, dosen tamu pada tahun 1981, sebelum menjadi direktur pendiri The Banking Centre (1984-1989). Ia adalah Kepala Departemen Ekonomi 1991-1996. Pada tahun 1979-1980, ia menjadi penasihat ekonomi senior untuk Kementerian Perencanaan, Arab Saudi, kemudian kepala ekonom untuk Saudi British Bank (HSBC) pada 1979-2006. Dia juga merupakan peneliti tamu Universitas Harvard pada 1982, profesor tamu Nottingham (1989-1990), dan kepala Pelatihan Kelompok di Midland Bank (1985-1990).⁹

Sebagai penasihat DTI FROM pada 1992, ia menjadi anggota Komite Perdagangan Timur Tengah (1992-2000), dan ketua Komite Aksi Area untuk Teluk Arab (1993-1998). Ia juga menjabat sebagai Direktur Dewan Kamar Dagang Arab Inggris pada 1990-an. Pada 2002, ia memenangkan Penghargaan Bank Pembangunan Islam dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Islam. Ia juga pernah mengerjakan proyek untuk Bank Dunia, IMF, DTI, British Aerospace, Wincott Foundation, dan lain-lain. Ia mendirikan Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis Saudi di London, yang didanai oleh DTI pada 1992. Dia masih tetap menjadi direktur asosiasi Maxwell Stamp PLC, konsultan ekonomi terkemuka.¹⁰

John R. Presley telah menulis atau menyunting 15 buku tentang Uni Moneter Eropa, sejarah ekonomi dan Keuangan Islam. Beberapa karya tulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, Persia, dan Arab. Sejumlah artikelnya telah diterbitkan di *The Economic Journal*, *Applied Economics*, *Scottish Journal*, *Manchester School*, dan jurnal-jurnal lainnya selama 40 tahun terakhir. Di antara karya tulisnya adalah *Islamic Finance: Theory and Practice* (1999), *A guide to the Saudi Arabian Economy* (1984), *Banking in the Arab Gulf* (1991), *European Monetary Integration* (1971), *Robertsonian Economics* (1979), *Currency Areas* (1976), *The Islamic Economic System: An Overview* (1988), dan *Islamic Economics: The Emergence of A New Paradigm* (1994).

Pemikiran Ekonomi Islam John R. Presley

1. Simpati Presley terhadap Ekonomi Islam

Syahrin Harahap. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).⁷
 Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikatif*.⁸
 (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

<https://www.lboro.ac.uk/schools/business-school/our-people/emeritus/john-presley/#tab1>⁹
<https://www.lboro.ac.uk/schools/business-school/our-people/emeritus/john-presley/#tab1>¹⁰

Ekonomi Islam, bagi Presley, yang telah muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir di negara-negara Muslim tertentu tidak dapat disangkal. Akan tetapi, ekonomi Islam telah ada sejak turunnya Alquran. Dalam pengertian ini, secara teoretis ekonomi Islam jauh lebih tua daripada ekonomi Barat. Islam terdiri dari serangkaian prinsip dan doktrin yang membimbing dan mengatur hubungan seorang Muslim dengan Tuhan dan dengan masyarakat. Dalam hal ini, Islam tidak hanya merupakan ibadah, seperti Yahudi dan Kristen, tetapi juga melibatkan kode etik yang mengatur umat manusia, baik dalam kehidupan spiritual maupun material. Pemeriksaan literatur kontemporer tentang ekonomi politik Islam menghasilkan sejumlah perbedaan substansial antara paradigma baru ini dan ekonomi kapitalis modern menyangkut bidang-bidang utama. Dan ini muncul dari prinsip-prinsip dasar Islam.¹¹ Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

Pertama, Tuhan adalah pencipta dan pemilik kekayaan dan manusia adalah khalifah Tuhan; namun manusia dapat mencari dan menggunakan kekayaan dalam bentuk amanah dari Tuhan. Kedua, bekerja merupakan kewajiban ilahi. Keadilan sosial adalah hasil dari kerja produktif dan kesempatan yang sama sehingga setiap orang dapat menggunakan semua kemampuannya dalam bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dari upaya kerja tersebut.¹²

Ketiga, keadilan dan kesetaraan dalam Islam berarti bahwa orang harus memiliki kesempatan yang sama dan tidak menyiratkan bahwa mereka harus sama dalam kemiskinan atau kekayaan. Namun, merupakan kewajiban negara Islam untuk menjamin tingkat penghidupan bagi warganya, yaitu tingkat minimum makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memoderasi perbedaan sosial dalam masyarakat Islam, dan untuk memungkinkan orang miskin menjalani kehidupan yang normal, spiritual, dan material dengan bermartabat dan puas.¹³

Keempat, cakupan intervensi ekonomi luas dan dapat mencakup campur tangan negara dalam banyak bidang kegiatan ekonomi. Campur tangan tersebut dapat mengambil banyak bentuk, termasuk bimbingan dan regulasi umum oleh Negara, tetapi juga dapat mencakup kepemilikan dan arahan negara yang lebih langsung. Tugas yang diberikan kepada Negara di bawah Islam terutama terdiri dari memerintah, menasihati, mengendalikan, dan melindungi. Alquran memerintahkan masyarakat untuk menaati Tuhan, Nabi-Nya, dan para penguasa mereka.

Sistem ekonomi Islam beroperasi berdasarkan prinsip dasar bahwa kekuatan penawaran dan permintaan harus bekerja secara bebas dalam penentuan harga di semua pasar. Hanya dalam keadaan luar biasa ada pembenaran untuk intervensi negara dan, bahkan di sini, tujuan intervensi tersebut bukanlah untuk menghalangi kebebasan perdagangan tetapi untuk mengamankan informasi yang lebih sempurna di pasar atau untuk mengatur atau mengatur kegiatan ekonomi sehingga melindungi kebebasan ekonomi tanpa merugikan pembeli atau penjual. Kelima, tidak ada pembenaran untuk pembayaran bunga pinjaman.¹⁴

Menurut Presley, para ekonom Barat agak lalai dalam dekade terakhir karena gagal mengenali apa yang tampak sebagai paradigma baru dalam ekonomi, yaitu ekonomi Islam. Kelalaian ini tidak mengejutkan: sebagian besar literatur canggih tentang subjek tersebut

John R. Presley and John G. Sessions. "Islamic Economics", 585.¹¹

John R. Presley and John G. Sessions. "Islamic Economics", 585.¹²

John R. Presley and John G. Sessions. "Islamic Economics", 585.¹³

John R. Presley and John G. Sessions. "Islamic Economics", 585.¹⁴

diterbitkan di negara-negara Muslim dan, oleh karena itu, tidak mudah tersedia bagi para ekonom Barat. Namun, sekarang ada momentum yang cukup di balik pengembangan ekonomi Islam untuk ditanggapi dengan sangat serius.¹⁵ Bahkan, Presley merangsang minat terhadap ekonomi Islam dengan harapan dapat mendorong pengakuan paradigma baru ini dalam literatur Barat dan menghasilkan kontribusi bagi evolusinya dari para ekonom dari semua aliran.

Sistem ekonomi Islam sangat menekankan keadilan sosial-ekonomi bagi semua anggota masyarakat Islam. Namun, bagi Presley, ini tetap menjadi konsep yang sulit untuk didefinisikan. Apakah itu tercapai atau tidak akan dipengaruhi oleh apakah orang mematuhi kewajiban yang berkaitan dengan kepemilikan properti atau kekayaan dan apakah prinsip-prinsip 'tauhid' dan persaudaraan dipatuhi. Ini mengarahkan bagaimana individu, melalui hubungannya dengan Tuhan, juga berhubungan dengan sesama manusia. Sementara keadilan sosial tampaknya mempromosikan kerja sama ekonomi, itu tidak melibatkan kesetaraan, hanya kesetaraan kesempatan bagi semua orang yang mampu bekerja, dan persyaratan untuk mendukung semua orang di masyarakat yang mampu menyediakan tenaga kerja.¹⁶

Munculnya ekonomi Islam sebagai paradigma baru dalam ekonomi telah disambut dengan ketidakpedulian yang meluas oleh banyak ekonom Barat. Ini sangat disayangkan: Apresiasi yang lebih luas terhadap ekonomi Islam tidak hanya akan meningkatkan pemahaman dunia Barat tentang bagaimana ekonomi Muslim (setidaknya secara teori) beroperasi, tetapi juga akan menawarkan perspektif yang menarik tentang banyak prinsip ekonomi Barat yang diterima. Presley mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah paradigma baru dan meminta agar kesalahpahaman tentang ekonomi Islam ditinggalkan

2. Masalah Pelarangan Riba

Menurut Presley, aspek ekonomi Islam yang paling luas jangkauannya dan kontroversial, dalam hal implikasinya dari perspektif Barat, adalah pelarangannya terhadap bunga (riba). Penghapusan pembayaran bunga jelas akan melibatkan “penulisan ulang” ekonomi kapitalis seperti saat ini dan akan menghasilkan perubahan besar dalam fungsi sistem ekonomi dan keuangan nasional dan internasional.¹⁷

Dalam pelarangan riba, Islam berusaha membangun masyarakat yang lagi-lagi didasarkan pada keadilan. Menurut Islam, semua pendapatan harus sepadan dengan usaha kerja. Meminjamkan uang untuk bunga memungkinkan pemberi pinjaman untuk menambah modalnya tanpa usaha karena uang tidak menciptakan nilai lebih dengan sendirinya. Hanya melalui perkawinan antara tenaga kerja dan modal, surplus atau defisit dapat terjadi. Oleh karena itu, lebih adil bagi penyedia modal untuk berbagi keuntungan atau kerugian dengan peminjam daripada memperoleh pengembalian tetap, terlepas dari hasil bisnis peminjam.

Larangan bunga tentu merupakan masalah yang kompleks. Namun, secara umum, menurut Presley, ada sejumlah tema yang mengalir dalam literatur Islam modern yang dapat diringkas di sini:¹⁸ Pertama, seseorang yang berpantang konsumsi, dengan menabung, tidak berhak secara otomatis atas pahala finansial atas pantangan tersebut. Kedua, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan mengapa pemberi pinjaman harus secara otomatis menerima pahala

John R. Presley and John G. Sessions. “Islamic Economics”, 585.¹⁵
 Paul S. Mills and John R. Presley, *Islamic Finance: Theory and Practice*. (London: Macmillan Press, 1999), 6¹⁶
 John R. Presley and John G. Sessions. “Islamic Economics”, 585.¹⁷
 John R. Presley and John G. Sessions. “Islamic Economics”, 585.¹⁸

hanya melalui tindakan peminjaman. Bunga sebagai pahala untuk menabung tidak memiliki dasar moral atau pembenaran.

Ketiga, ada perbedaan tajam antara uang dan modal: uang tidak disamakan dengan modal, meskipun dapat dianggap sebagai modal potensial; transformasi uang menjadi modal memerlukan penambahan usaha, yaitu pengambilan risiko dan pengetahuan tentang cara menggabungkan faktor-faktor produksi dengan uang secara produktif.¹⁹

Pemberi pinjaman tidak memiliki hak atas pahala otomatis karena menyediakan uang kecuali ia ikut serta dalam penyediaan usaha: bahkan dalam hal itu pahala tidak ditetapkan atau dijamin, tetapi ditentukan oleh proporsi kontribusi ini; ini, pada gilirannya, menentukan bagian keuntungan (atau kerugian) yang dapat dibenarkan.

Keempat, keadilan memiliki dua dimensi: pemasok modal memiliki hak untuk mendapatkan bagian keuntungan yang sepadan dengan risiko dan upaya kerja yang diberikan; oleh karena itu, hal itu tidak boleh ditentukan oleh tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini, tetapi oleh tingkat pengembalian pada proyek individu yang menjadi tujuan penyediaan modal; hanya waktu yang akan menentukan apakah ini melebihi atau kurang dari tingkat bunga pasar saat ini. Kelima, hubungan kreditur/debitur putus dalam Islam. Pemberi pinjaman menjadi mitra dalam bisnis atau proyek, berbagi dalam penyediaan perusahaan dan karena itu tidak dijauhkan dari penggunaan uang yang digunakan.²⁰

Posisi tentang bunga ini, menurut Presley, dapat diklasifikasikan dengan mengacu pada hak milik. 'Uang mewakili klaim yang diuangkan dari pemiliknya atas hak milik.'²¹ Meminjamkan uang tidak lebih dari sekadar pengalihan hak milik ini. Jika peminjam tidak memanfaatkan pinjaman secara produktif untuk menghasilkan kekayaan tambahan, tidak ada klaim atas hak milik tambahan baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Sebaliknya, jika uang digunakan secara produktif dalam menciptakan kekayaan tambahan, pemberi pinjaman maupun peminjam memiliki klaim atas bagian dari kekayaan tambahan itu, tetapi tidak dalam hal pengembalian tetap terlepas dari tingkat kekayaan tambahan itu.²²

Presley meyakini bahwa pembayaran dengan bunga (riba) secara tegas dilarang oleh Alquran dan investor harus diberi kompensasi dengan cara lain. Metode yang lazim untuk remunerasi tersebut adalah dengan cara bagi hasil untung-rugi berupa akad *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan kontrak bagi hasil di mana pengembalian kepada pemberi pinjaman sesuai dengan rasio yang disepakati dalam hasil laba/rugi proyek tempat mereka berinvestasi.²³

Dengan menerapkan ide-ide yang dikembangkan dalam literatur kontrak Barat, Presley menunjukkan bahwa penggunaan *mudharabah* dapat bertindak sebagai perangkat pengungkapan yang efisien. Ide dasarnya adalah bahwa jika hasil proyek bersifat stokastik, dan jika manajer memiliki keuntungan informasi mengenai stokastisitas ini atas investor, maka kontrak *mudharabah* antara manajer dan investor akan mengarah pada pengungkapan informasi tersebut yang lebih efisien.²⁴

John Presley. *Directory of Islamic Financial Institution*. (London: Routledge, 1998), 68-69.¹⁹

John R. Presley and John G. Sessions. "Islamic Economics", 586.²⁰

John Presley, "Directory of Islamic Financial Institution", 70.²¹

John R. Presley and John G. Sessions, "Islamic Economics", 587.²²

John R. Presley and John G. Sessions, "Islamic Economics", 587.²³

John R. Presley and John G. Sessions, "Islamic Economics", 587.²⁴

Secara khusus, kritik terhadap pembiayaan utang berbunga memiliki kebenaran ekonomi yang lebih kuat daripada yang diasumsikan oleh ekonomi arus utama. Posisi ini telah lama ada dalam pemikiran ekonomi Yahudi-Kristen dan Barat awal, tetapi sekarang paling jelas dikembangkan dalam analisis Islam tentang perbankan dan keuangan. Oleh karena itu, kritik Islam tentang bunga dan proposal untuk sistem perbankan non-bunga dalam konteks pendekatan Islam terhadap analisis ekonomi perlu disambut.²⁵

Dalam pengamatan Presley, masih banyak ketidaktahuan di Amerika Serikat dan Eropa tentang apa yang dimaksud dengan perbankan Islam. Menurut Presley, tidak mungkin lagi mengabaikan kemajuan keuangan Islam; bank-bank komersial semakin diminta untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga Islam baru dan untuk menyesuaikan diri dengan prosedur perbankan Islam yang berlaku di sebagian besar negara-negara Muslim.²⁶

Mudarabah sebagai Alat “Pewahyuan” yang Efisien

Larangan bunga telah menyebabkan terciptanya skema alternatif untuk remunerasi modal. Metode kompensasi yang lazim adalah melalui kontrak bagi untung-rugi (*mudarabah*), yang pengembalian modalnya kepada pemberi pinjaman sesuai dengan rasio yang disepakati dalam hasil untung-rugi proyek tempat mereka berinvestasi. Presley melihat *mudarabah* memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai perangkat pewahyuan yang efisien.²⁷

Untuk lebih spesifik, Presley memberikan contoh proyek tunggal yang dilakukan oleh seorang manajer tunggal, yang hasilnya ditentukan oleh tingkat investasi modal, tingkat upaya manajerial, dan keadaan alam, yang dia bayangkan dalam hal beberapa guncangan acak terhadap permintaan atau teknologi.²⁸

Kontrak berbasis riba dan *mudarabah* dalam kondisi tertentu, yang terakhir akan bertindak untuk meningkatkan tingkat investasi modal dalam proyek. Asumsi utamanya adalah informasi asimetris. Manajer diasumsikan memiliki informasi yang lebih unggul daripada investor dalam dua hal: Pertama, setelah menandatangani kontrak dengan investor, manajer dapat mengamati permintaan atau kondisi produktivitas yang memengaruhi proyek sebelum berkomitmen pada keputusan produksi; dan kedua, hanya dia yang mengamati tingkat usahanya sendiri.²⁹

Asumsi asimetris seperti itu bukanlah hal yang tidak biasa dan, memang, merasionalisasi keterlibatan manajer dalam proyek. Namun, sementara keahlian informasi relatif manajer menunjukkan bahwa ia harus didelegasikan beberapa wewenang atas keputusan produksi, eksploitasi keahlian ini bermasalah. Karena usaha adalah informasi pribadi, manajer tidak dapat diberi kompensasi secara langsung untuk penyediaannya. Oleh karena itu, masalah pengungkapan muncul dengan preferensi manajer atas masukan produktif yang hanya bertepatan dengan investor jika ia secara pribadi menanggung seluruh risiko guncangan yang merugikan.³⁰

Jika manajer menghindari risiko, kebijakan tersebut, meskipun efisien secara produktif, tidaklah optimal. Lebih jauh, kebijakan membayar manajer dengan pengembalian tetap yang

Paul S. Mills and John R. Presley, “Islamic Finance: Theory and Practice”, viii.²⁵
John R. Presley. Preface. Dalam *Directory Of Islamic Financial Institutions* (ed) John R. Presley (Canada: 26
Routledge, 1988), Vii.

John R. Presley and John G. Sessions, “Islamic Economics”, 587.27

John R. Presley and John G. Sessions, “Islamic Economics”, 587.28

John R. Presley and John G. Sessions, “Islamic Economics”, 587.29

John R. Presley and John G. Sessions, “Islamic Economics”, 587.30

tidak bergantung pada hasil juga tidak efisien karena tidak ada insentif baginya untuk memberikan lebih banyak upaya ketika produk pendapatan marjinalnya tinggi.³¹

Salah satu jalan keluar dari dilema tersebut adalah merancang kontrak yang kompatibel dengan insentif yang memastikan bahwa biaya misinformasi oleh manajer cukup tinggi untuk menjadikan kejujuran sebagai kebijakan terbaiknya. Untuk memperoleh kompatibilitas insentif tersebut dengan kerugian minimum dalam efisiensi, kontrak harus menentukan tingkat input produktif yang rendah secara tidak efisien dalam kondisi tertentu di dunia.

Presley mengasumsikan hanya dua kondisi alamiah, 'baik' dan 'buruk', dan teknologi produksi sedemikian rupa sehingga produk pendapatan total dan marjinal lebih tinggi dalam kondisi baik daripada dalam kondisi buruk. Berdasarkan asumsi ini, kontrak riba yang kompatibel dengan insentif menyiratkan bahwa investasi modal dalam kondisi buruk ditetapkan di bawah tingkat efisiensi produktif informasi lengkap, sedangkan dalam kondisi baik ditetapkan pada tingkat efisiensi produktif. Hasil ini muncul dari godaan manajer berdasarkan kontrak riba untuk mengganti modal dengan usaha dan dengan demikian mengurangi biaya usaha, yang tidak diketahui publik. Secara intuitif, pengurangan investasi dalam kondisi buruk hanya memiliki efek tingkat kedua pada pengembalian dari proyek, tetapi tetap saja membebankan biaya tingkat pertama pada manajer dalam kondisi baik jika ia memilih untuk memberikan informasi yang salah kepada investor mengenai permintaan atau kondisi produktivitas yang memengaruhi proyek. Hal ini memungkinkan perbedaan kompensasi antara kedua kondisi tersebut dikurangi sambil mempertahankan kompatibilitas insentif.³²

Di bawah kontrak *mudarabah*, upaya manajeriallah yang mengambil peran untuk mengawasi kontrak. Kontrak bunga menciptakan pemetaan eksplisit antara masukan dan remunerasi modal. Di bawah kontrak pinjaman berbunga yang kompatibel dengan insentif standar, manajer dibiarkan bebas untuk memilih tingkat upaya optimal secara individual di setiap kondisi yang bergantung pada tingkat investasi yang ditentukan. Sebaliknya, kontrak *mudarabah* menciptakan pemetaan eksplisit antara remunerasi modal dan hasil proyek, larangan bunga menyiratkan bahwa kompensasi tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan tingkat investasi modal.³³

Oleh karena itu, *mudarabah* memungkinkan kontrak untuk mengendalikan insentif manajer untuk mengerahkan upaya secara langsung, karena upaya ini memengaruhi hubungan antara investasi modal dan hasil proyek. Berdasarkan kontrak *mudarabah*, manajer dibiarkan bebas untuk memilih tingkat investasi optimal secara individual di setiap kondisi yang bergantung pada tingkat upaya yang ditentukan dalam kontrak. Terlihat bahwa tingkat optimal secara individual ini sesuai dengan tingkat efisiensi produktif informasi lengkap sehingga diperoleh peningkatan varians rata-rata dalam investasi modal: investasi rata-rata meningkat sementara fluktuasi besar yang tidak efisien di sekitar tingkat ini berkurang.³⁴

Sistem Moneter yang Adil?

Untuk mengetahui gagasan Presley tentang sistem moneter, kita bisa melihat dari ulasannya terhadap buku M. Chapra berjudul *Towards A Just Monetary System*. Presley mengutip perkataan Khurshid Ahmad dalam kata pengantarnya, yang menulis bahwa buku

John R. Presley and John G. Sessions, "Islamic Economics", 588.³¹

John R. Presley and John G. Sessions, "Islamic Economics", 588.³²

John R. Presley and John G. Sessions, "Islamic Economics", 588.³³

John R. Presley and John G. Sessions, "Islamic Economics", 588.³⁴

tersebut untuk memberikan "studi yang komprehensif dan interpretatif tentang sistem moneter Islam"³⁵, untuk "mengintegrasikan teori dan praktik" dan untuk "memberikan analisis yang kuat tentang beberapa konsep utama"³⁶ dalam ekonomi moneter Islam. Oleh karena itu, pembaca diberi harapan yang sangat tinggi terhadap buku ini sebagai awal dari fase keempat ekonomi Islam, "pendekatan yang lebih integratif sekaligus lebih kritis terhadap seluruh teori dan praktik uang dan perbankan dalam Islam"³⁷ Jika harapan ini terpenuhi, Chapra mengklaim telah memelopori karya dalam ekonomi makro Islam, tetapi apakah ini benar?³⁸ Itulah pertanyaan Presley untuk buku tersebut.

Menurut Presley, literatur tentang ekonomi makro Islam belum menawarkan, setidaknya dalam bahasa Inggris, lebih dari sekadar pendekatan sepotong-sepotong terhadap sistem ekonomi makro yang lengkap. Sudah ada beberapa kontributor terkemuka di bidang tertentu, khususnya keuangan publik, peran negara, pertumbuhan dan pembangunan, konsumsi dan investasi³⁹, tetapi belum ada seorang pun yang menciptakan kerangka kerja Islam yang di dalamnya pasar-pasar yang berbeda dapat dilihat bekerja sama; belum ada analisis "keseimbangan umum" yang sesuai dengan Islam meskipun telah ada beberapa upaya berani untuk mencapainya; juga tidak ada pemahaman yang jelas tentang proses-proses dinamis yang ada dalam sistem Islam yang ideal.⁴⁰

Menuju Teori Umum?

Sebagai pengulas, Presley mengakui bias tertentu. Pendekatannya terhadap ekonomi Islam adalah melalui bahasa Inggris dan dengan latar belakang pemikiran ekonomi Barat. Sulit, jika tidak mustahil, untuk melepaskan belenggu yang diciptakan oleh latar belakang ini. Namun, dalam beberapa hal, ini mungkin merupakan perspektif yang membantu dalam menilai kontribusi Chapra. Buku Chapra muncul satu tahun sebelum ulang tahun kelima puluh karya besar Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, dan menarik beberapa persamaan yang menarik adalah hal yang produktif. Buku Keynes adalah awal dari ekonomi makro modern; buku ini juga diberi label sebagai karya integratif. Buku ini juga memiliki pendekatan kritis terhadap apa yang telah terjadi sebelumnya dalam mazhab 'klasik'.⁴¹

Buku Chapra *Towards a Just Monetary System*, bagi Presley, tidak memiliki bobot atau otoritas seperti Teori Umum Keynes. Chapra akan menjadi orang pertama yang mengakui hal ini. Namun, buku ini memiliki kapasitas untuk melakukan bagi ekonomi makro Islam apa yang dilakukan Keynes untuk teori ekonomi makro Barat dan kebijakan ekonomi. Titik tolak Chapra pada dasarnya berbeda dengan Keynes. Menurut Presley, keduanya tidak menawarkan dukungan empiris apa pun untuk argumen yang diajukan masing-masing, tetapi Chapra dibebaskan dari keterbatasan ini karena ia mencoba menggambarkan cara kerja sistem moneter Islam yang ideal atau sempurna yang tentu saja sulit diuji secara empiris. Sebaliknya, Keynes

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), 12.³⁵

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, 13.36

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, 11.37

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of *Towards a Just Monetary System*", by M. Umer Chapra. 38

JKAU: Islamic Econ., Vol. 2, pp. 109-115 (1410 A.H./1990 A.D.). 109

Siddiqi, M.N. "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature", in *Studies of Islamic Economics*, K. Ahmad (ed.), (International Centre for Research in Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1980)194-235

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of *Towards a Just Monetary System*", 110.40

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of *Towards a Just Monetary System*", 110.41

berfokus pada penjelasan tentang bagaimana dunia nyata, setidaknya ekonomi kapitalis yang nyata, berfungsi. Chapra mendefinisikan apa yang seharusnya terjadi, Keynes mengira ia menggambarkan apa yang terjadi—ekonomi riil dengan segala ketidaksempurnaannya.⁴²

Saat ini timbul masalah bagi ekonomi makro Islam dalam hal kegunaannya. Jika sistem ekonomi makro Islam yang sempurna dapat didefinisikan dengan jelas—dan ini adalah tujuan Chapra—bagaimana sistem itu dapat diimplementasikan? Sebagai ekonom, kita semua mengetahui keunggulan persaingan sempurna, tetapi menyadari kesulitan untuk mencapainya dalam praktik. Akankah teori ekonomi makro Islam hanya menggambarkan sistem ekonomi makro ideal kita, atau akankah teori itu juga memiliki sarana untuk membawa kita ke sana?. Itulah pertanyaan-pertanyaan Presley untuk Chapra.

Bagi Presley, proses transformasi menjadi krusial. Chapra tidak mengidentifikasi proses transformasi ini secara meyakinkan; ini bukan sekadar masalah perubahan kelembagaan dan peraturan, ini adalah perubahan mendasar, mungkin selama bertahun-tahun, dalam cara produsen, konsumen, pengusaha, pemasok tenaga kerja Muslim, dan lain-lain, berperilaku.⁴³

Meskipun buku Keynes mengagumkan, selama lima puluh tahun terakhir para ekonom telah mengembangkan tema-tema umumnya dan menambahkan kecanggihannya sebagai penjelasan tentang ekonomi riil dan moneter. Ini juga akan berlaku untuk buku Chapra. Keynes tidak benar-benar menyajikan pandangan yang jelas tentang cara kerja sistem makro yang terpadu dengan kerangka IS/LM dan upaya selanjutnya dalam analisis keseimbangan umum yang melakukannya. Chapra juga tidak benar-benar memberikan pendekatan terpadu. Hanya ada sedikit panduan tentang bagaimana pasar harus bekerja sama, hanya beberapa petunjuk tentang pengoperasian pasar individual—pasar untuk barang-barang konsumen dan produktif serta pasar untuk keuangan. Banyak kebingungan ekonomi makro Barat selama lima puluh tahun terakhir yang sama-sama ada dalam buku Chapra dan perlu diklarifikasi dalam karya selanjutnya.⁴⁴

Elemen utama dalam daftar ini adalah perbedaan antara konsep stok dan aliran serta integrasinya yang konsisten ke dalam teori, pengembangan terkait analisis statis dan dinamis, khususnya pengembangan analisis ketidakseimbangan, dampak ketidakpastian dan ekspektasi dalam model ekonomi makro Islam (dapatkah kita selamanya menganggap dunia nyata dengan pengetahuan dan mobilitas yang sempurna), dan analisis terperinci tentang penjabaran sistem ekonomi Islam dan Barat serta peran tatanan ekonomi Islam dalam ekonomi dunia. Realisasi dalam teori ekonomi makro Barat adalah bahwa tidak ada jawaban pasti untuk masalah ekonomi makro teoretis dan praktis serta pencapaian tujuan ekonomi makro. Yang dapat diharapkan oleh para ekonom adalah perdebatan positif yang memiliki dampak menguntungkan bagi para pembuat kebijakan. Hal ini berlaku bagi ekonom makro Islam seperti halnya bagi ekonom klasik, Keynesian, moneteris, atau neoklasik. Kita semua sedang mencari kebenaran tanpa henti.⁴⁵

Selain itu, Presley melihat Chapra gagal memberikan seperangkat hipotesis yang dapat diuji dan seperangkat aturan kebijakan yang diperoleh secara konsisten. Misalnya, ia

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 110.⁴²

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 111.⁴³

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 111.⁴⁴

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 110.⁴⁵

menyerukan reformasi sistem pajak⁴⁶ tetapi tidak memberikan indikasi bentuk atau struktur yang harus dipertimbangkan oleh reformasi ini. Hal ini tidak berbeda dengan situasi di negara-negara Barat yang saat ini tengah mencari struktur pajak yang optimal, mengakui ketidakpuasan terhadap ketidakadilan di antara para pembayar pajak, dan menunjukkan kekhawatiran tentang disinsentif dan irasionalitas dalam struktur fiskal yang telah diadopsi selama berabad-abad.⁴⁷

Jika Chapra gagal memberikan model ekonomi Islam yang terintegrasi dan pedoman yang tepat tentang kebijakan, pertanyaan terpenting yang harus kita perhatikan adalah sejauh mana Chapra telah mengidentifikasi karakteristik pembeda dari sistem moneter Islam dan dengan demikian tujuan, instrumen, dan kebijakan yang sesuai dengannya. Jika hal ini telah tercapai, maka kita dapat menganggap bahwa ia telah benar-benar meletakkan fondasi yang menjadi dasar bagi model ekonomi makro Islam.⁴⁸

Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Tujuan utama sistem ekonomi Islam, menurut Presley, tidak dapat dibedakan dari tujuan ekonomi sistem lainnya, meskipun alasan yang mendasari tujuan-tujuan ini mungkin memiliki perbedaan yang kentara. Keinginan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi dalam ajaran Islamlah yang mengarah pada tujuan ekonomi yang dinyatakan. Alasan yang mendasari ini menjadi penting ketika mempertimbangkan, sebagaimana mestinya, prioritas ketika tujuan-tujuan ini tidak dapat dicapai secara bersamaan. Selain itu, pencapaian tujuan-tujuan ekonomi ini menjadi kepentingan sekunder jika kebijakan yang diadopsi untuk mencapainya merusak nilai-nilai Islam dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁹

Sejalan dengan sistem ekonomi alternatif, tujuan ekonomi utama dapat dicanangkan sebagai pencapaian lapangan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan yang optimal bersama dengan nilai uang yang stabil. Ditambah dengan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, termasuk pengembalian yang adil kepada semua anggota masyarakat dari pembangunan ekonomi⁵⁰. Penekanan utama sistem ekonomi Islam disorot oleh pertimbangan-pertimbangan terakhir ini yang memberikan peran dominan pada pemaksimalan kesejahteraan umat.⁵¹

Pemaksimalan kesejahteraan sosial dan pengurangan kesulitan menyediakan kriteria yang menjadi dasar tujuan dan kebijakan ekonomi Islam. Semua kebijakan ekonomi harus ditujukan untuk mengurangi penderitaan manusia dan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Misalnya, lapangan kerja penuh tidak hanya memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tetapi juga memberi mereka martabat dalam masyarakat.⁵²

Kepercayaan Islam memungkinkan individu untuk memanfaatkan semua sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan material mereka asalkan tidak melibatkan pemborosan yang berlebihan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi hanya penting jika memungkinkan pengembangan kesejahteraan ekonomi yang luas. Pertumbuhan ekonomi akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam jika dicapai melalui produksi barang dan jasa yang tidak penting

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, 228⁴⁶

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 111.47

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 111.48

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 111.49

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, 33-45⁵⁰

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 111.51

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, 35-36.⁵²

atau dipertanyakan secara moral, atau pelebaran kualitas yang tidak baik atau merugikan generasi sekarang atau masa depan dengan merusak lingkungan moral atau fisik mereka⁵³

Inflasi merusak fungsi uang dan menyebabkan inefisiensi dalam sistem moneter. Ia mendistribusikan kembali pendapatan dengan cara yang sewenang-wenang dan sering kali tidak adil dan dengan menimbulkan ketidakpastian menghambat pembentukan modal dan menyebabkan salah alokasi sumber daya. Kepentingan relatifnya bagi ekonomi Islam ditunjukkan: "Inflasi cenderung memutarbalikkan nilai, memberi penghargaan pada spekulasi (yang tidak dianjurkan oleh Islam) dengan mengorbankan aktivitas produktif (yang didorong oleh Islam) dan mengintensifkan ketimpangan distribusi pendapatan (yang dikutuk oleh Islam)".⁵⁴ Namun, kita harus mempertanyakan apakah kekhawatiran ini hanya terjadi pada ekonomi Islam. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa ekonomi Islam akan terlindungi dari konflik yang mencegah pencapaian tujuan ini secara bersamaan di semua ekonomi lain di dunia. Seperti halnya ekonomi Kapitalis, harus ada beberapa *trade-off* di antara keduanya, tidak peduli betapa menyakitkannya pemikiran tentang *trade-off* ini.

Chapra, menurut pandangan Presley, tampaknya menyiratkan bahwa *trade-off* ini tidak akan terjadi dalam ekonomi Islam yang ideal, tetapi hanya ekonom yang paling ideologis yang akan gagal mengenali bahwa ekonomi dunia semuanya dicirikan oleh ketidakstabilan dan perubahan berkelanjutan dengan kebutuhan yang sesuai untuk penyesuaian. Pilihan antara solusi kebijakan alternatif pasti mengarah pada penilaian nilai dan ini tidak akan berbeda dalam ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Namun, mungkin ada penolakan terhadap kebijakan ekonomi yang luas, seperti pengurangan umum permintaan untuk mengatasi inflasi. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus diarahkan pada pengurangan permintaan untuk produk yang tidak penting atau terhadap produk yang paling tidak membahayakan kesejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan, dengan demikian mempertimbangkan kebutuhan semua individu.⁵⁵

Kebijakan Moneter Islam

Menurut Presley, ada dua aspek yang terdokumentasi dengan baik dan menonjol dari sistem Islam yang memerlukan perhatian khusus. Pertama, Islam mengutuk penimbunan tabungan. Setiap sumber daya yang tidak terpakai, termasuk sumber daya keuangan, harus digunakan secara produktif. Lembaga keuangan memiliki peran dalam hal ini dengan memobilisasi sumber daya ini untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan bank sentral, melalui kerangka kerja non-inflasi, untuk memperluas pasokan uang guna merangsang permintaan agregat yang cukup untuk mendorong penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang tidak terpakai. Kedua, tidak ada lembaga keuangan yang boleh beroperasi atas dasar riba atau bunga dan ini merupakan bagian penting dari setiap program ekonomi Islam.⁵⁶

Perbedaan mendasar antara keuangan dalam ekonomi Islam dan non-Islam adalah sikap terhadap bunga. Inti dari ajaran Islam adalah melarang eksploitasi dan ketidakadilan. Salah satu bentuk ketidakadilan tersebut terjadi ketika pemberi pinjaman dijamin mendapatkan

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, 35-36.⁵³

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, 3854

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", by M. Umer Chapra. 55
JKAU: Islamic Econ., Vol. 2, pp. 109-115 (1410 A.H./1990 A.D.). 114.

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of *Towards a Just Monetary System*", 112.56

keuntungan pasti meskipun pemodal tidak menanggung risiko atau melakukan pekerjaan apa pun. Di sisi lain, peminjam, meskipun bekerja keras dan memiliki keterampilan berwirausaha, tidak dijamin mendapatkan keuntungan pasti apa pun. Oleh karena itu, Islam melarang tingkat keuntungan pasti yang telah ditentukan sebelumnya atas pinjaman.⁵⁷

Pengganti yang disarankan adalah pembagian laba rugi, di mana pemodal membagi laba dan rugi bisnis secara proporsional dengan bagian modalnya dalam bisnis tersebut. Namun, bagi Presley, patut dipertanyakan apakah adil bagi pemodal untuk menerima bagian laba yang begitu tinggi jika yang mereka berikan hanyalah modal. Pengusaha tidak hanya mempertaruhkan modal tetapi juga usaha manusianya dan tentunya harus diizinkan lebih dari bagian laba yang diberikan sesuai dengan proporsi modalnya yang diinvestasikan dalam bisnis tersebut.⁵⁸

Selain itu, jika lembaga keuangan memiliki klaim sebelumnya atas kreditor lain atas aset bisnis debitur jika terjadi kebangkrutan, hal ini mungkin dianggap tidak adil secara sosial dalam ekonomi Islam. Solusi untuk melindungi simpanan bank anggota masyarakat yang relatif miskin jika terjadi situasi yang mendukung bisnis yang merugi adalah melalui skema asuransi. Seseorang mungkin terpaksa bertanya mengapa hanya deposan yang memiliki perlindungan asuransi terhadap kerugian, bukankah ini juga berlaku bagi pengusaha yang telah mempertaruhkan lebih dari sekadar modalnya?⁵⁹

Seseorang mungkin juga mempertanyakan bagaimana ini akan bekerja pada saat resesi atau krisis keuangan yang tidak terduga, karena tidak ada alasan apriori untuk berasumsi bahwa ekonomi Islam akan terhindar dari masalah ekonomi seperti itu di masa mendatang. Investasi akan sangat bergantung pada kemampuan pemberi pinjaman dan peminjam dalam memprediksi peristiwa ekonomi di masa depan, semacam pandangan dunia yang sempurna. Sayangnya, dunia tidak dicirikan oleh kejadian yang dapat diprediksi, sehingga di bawah perjanjian pembagian laba rugi, orang-orang dengan informasi yang lebih baik daripada orang lain memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi mereka yang kurang beruntung. Ketidakpastian apa pun akan menghalangi pemodal atau pemasok dana yang menghindari risiko untuk terjun ke proyek-proyek berisiko.⁶⁰

Namun, ekonomi kapitalis yang didasarkan pada prinsip pasar bebas juga akan berpendapat bahwa salah alokasi sumber daya dan inefisiensi dapat terjadi dalam keuangan perusahaan bisnis yang berisiko, sehingga gagal memenuhi kriteria ekonomi pasar yang sukses. Misalnya, bentuk kegagalan pasar ini terjadi dalam situasi risiko dan ketidakpastian ketika agen ekonomi, seperti pemberi pinjaman dan peminjam, memiliki informasi asimetris. Seperti halnya ekonomi Islam, pembiayaan ekuitas dapat digunakan sebagai cara yang adil untuk membagi risiko antara pemodal dan pengusaha.⁶¹

Islam memperbolehkan pembiayaan ekuitas untuk jangka waktu yang tidak terbatas, seperti dalam kasus kemitraan dan perusahaan saham gabungan, atau jangka waktu tertentu seperti dalam kasus modal pinjaman (misalnya, pinjaman, uang muka)⁶². Bentuk pembiayaan

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 113.⁵⁷

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 113.⁵⁸

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 113.⁵⁹

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 113.⁶⁰

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of Towards a Just Monetary System", 113. ⁶¹

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, 68.⁶²

kedua, *qard hasan*, juga diperbolehkan. Dalam kasus ini pinjaman dilunasi tanpa bunga atau tanpa pembagian keuntungan dan kerugian. Pinjaman ini dibuat atas dasar altruistik. Namun, selama periode inflasi, pemberi pinjaman akan menderita karena peminjam karena nilai riil *qard hasan* menurun. Dengan demikian, inflasi menyebabkan ketidakadilan bagi pemberi pinjaman.⁶³

Pendekatan terhadap keuangan ini, menurut Chapra, dapat diperluas ke semua bentuk pinjaman, baik untuk konsumsi pribadi maupun pengeluaran pemerintah. Keuangan tidak boleh disediakan untuk barang-barang konsumen yang tidak penting atau bergengsi. Barang-barang konsumen penting lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan, seperti perumahan, yang meningkatkan kesejahteraan seseorang harus dibiayai berdasarkan pembagian laba rugi yang dapat dihitung dengan memperkirakan sewa tersirat yang diperoleh dari kepemilikan barang-barang ini. Dalam kasus keuangan pemerintah, ada argumen kuat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran mereka. Barang-barang yang sesuai dengan harga komersial harus disediakan berdasarkan pembagian laba rugi melalui obligasi yang dijual ke sektor swasta, termasuk lembaga keuangan. Hanya sebagian kecil barang yang tidak dapat disediakan dengan cara ini, yaitu, ketika sewa tersirat tidak dapat dihitung atau ketika ada pengembalian sosial yang tinggi dan ini harus dibiayai melalui perpajakan.⁶⁴

Meskipun hal ini mungkin efektif dalam ekonomi yang maju, orang harus mempertanyakan apakah keuangan yang cukup dapat dimobilisasi menggunakan pendekatan ini dalam ekonomi yang sedang berkembang dengan sektor keuangan yang relatif terbelakang. Kekhawatiran atas utang sektor publik yang tinggi dan keuangannya merupakan ciri yang dapat diamati di banyak negara di seluruh dunia. Dengan tidak adanya anggaran yang seimbang, masalah pembiayaan utang domestik dan luar negeri yang terus meningkat akan tetap ada dan tidak akan diselesaikan dengan beralih ke sistem keuangan bagi hasil. Sulit untuk melihat bagaimana utang sektor publik yang besar di banyak negara Islam dapat dialihkan dari utang berbunga saat ini ke utang yang didasarkan pada laba rugi.⁶⁵

Seperti yang ditegaskan Chapra dengan tepat: "Namun, kendala utama bagi proses Islamisasi adalah utang domestik dan luar negeri berbunga yang memberatkan di sebagian besar negara Muslim".⁶⁶

Akan tetapi, sulit juga untuk melihat bagaimana jumlah besar yang dibutuhkan untuk membiayai program pembangunan yang diperlukan dapat diperoleh berdasarkan pembiayaan untung rugi ketika keuntungan dari skema tersebut tidak mungkin diperoleh selama beberapa dekade. Dalam kasus ketika sewa yang diperhitungkan dapat dihitung tetapi jumlahnya lebih kecil dari sewa aktual yang diterima, pertanyaan tentang bagaimana perbedaan tersebut akan dibiayai harus dijawab. Chapra dengan tepat mengakui ketergantungan pada keuangan non-Muslim hanya akan hilang ketika negara-negara Muslim menjadi lebih kuat. Bahkan ketika arus perdagangan internasional menjadi lebih terjalin dan kompleks, negara-negara Muslim perlu meyakinkan seluruh dunia tentang manfaat keuangan bebas bunga jika mereka akhirnya ingin membebaskan diri dari semua jejak bunga.⁶⁷

John R. Presley dan A. J. Westaway. "Review of *Towards a Just Monetary System*", 114.⁶³

John R. Presley dan A. J. Westaway. "Review of *Towards a Just Monetary System*", 114.⁶⁴

John R. Presley dan A. J. Westaway. "Review of *Towards a Just Monetary System*", 114.⁶⁵

M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, 231.⁶⁶

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of *Towards a Just Monetary System*", 114.⁶⁷

Jadi, Presley berpendapat bahwa ada banyak kesamaan antara tujuan dan perhatian negara-negara Islam dan non-Islam. Sekilas sistem ekonomi yang disarankan oleh Chapra tampak dekat dengan model pasar bebas yang sempurna yang disarankan oleh para ekonom liberal. Tema-tema utama yang tampak dalam pendekatan Islam adalah pentingnya kesejahteraan sosial, pengurangan kesenjangan, mobilisasi tabungan, penghapusan bunga, kebutuhan pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran mereka, dan pembatasan sektor publik untuk menyediakan berbagai barang dan jasa yang terbatas. Pada waktunya, semua bisnis harus dibiayai dengan ekuitas. Jelas transisi akan berlangsung lambat dan memerlukan perencanaan yang cermat jika ingin mencapainya.⁶⁸

Penutup

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, ekonomi Islam dapat menjadi ladang dialog yang bermanfaat antara dunia Islam dan Barat. Kehadiran ekonomi Islam sebagai paradigma baru dalam ekonomi telah disambut dengan ketidakpedulian yang meluas oleh banyak ekonom Barat. Apresiasi yang lebih luas terhadap ekonomi Islam tidak hanya akan meningkatkan pemahaman dunia Barat tentang bagaimana perekonomian umat Islam beroperasi, tetapi juga menawarkan perspektif yang menarik tentang banyak prinsip ekonomi Barat yang diterima.

Kedua, mengingat konsep tersebut masih baru dan radikal, teori dan praktik keuangan bebas bunga telah berkembang jauh secara mengejutkan. Bank bebas bunga telah terbukti sebagai lembaga yang tahan lama dan menikmati pertumbuhan simpanan yang substansial. Secara teoretis, kontrak bagi hasil, reksa dana, dan sewa dapat menjalankan banyak fungsi pembiayaan utang dan penggunaan eksklusifnya menawarkan banyak manfaat potensial. Ini termasuk alokasi dana pinjaman yang lebih efisien. Sektor perbankan yang dapat lebih mudah memasok modal risiko jangka panjang; penekanan yang lebih besar pada investasi produktif dibandingkan konsumsi dan spekulasi; dan sektor keuangan yang stabil dan menstabilkan. Selain itu, teori bebas bunga telah berkembang cukup untuk melawan tuduhan bahwa penghapusan bunga akan secara signifikan mengurangi kecenderungan menabung, bahwa kebijakan moneter tidak akan berdaya tanpa suku bunga untuk memengaruhi dan bahwa ekonomi seperti itu akan menjadi tidak dapat dijalankan oleh masalah bahaya moral.

Namun, masih terdapat kekurangan serius dalam praktik dan teori. Bank-bank Islam yang ada terus berkonsentrasi pada kredit perdagangan mark-up daripada pembiayaan investasi bagi hasil. Hal ini dapat dijelaskan melalui berbagai fitur lingkungan operasi mereka (misalnya keuntungan buatan yang diberikan kepada bank-bank konvensional, keberadaan utang pemerintah yang berkelanjutan). Namun, bank-bank non-bunga yang ada belum menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki potensi pengembangan yang signifikan. Selain itu, para ahli teori Islam pada umumnya gagal mengatasi masalah-masalah praktis yang sulit terkait pembayaran utang pemerintah yang ada; dampak operasi non-bunga terhadap penentuan nilai tukar mata uang asing dan arus modal internasional; dan definisi akuntansi yang tepat tentang 'laba' yang akan dibagi dengan pemasok modal.

John R. Presley dan A. J. Westaway, "Review of *Towards a Just Monetary System*", 114.⁶⁸

Daftar Rujukan

- Alamasi, Adnan Mustafa-Sabri M.J. "Critiques Of Islamic Economics An Assessment of Some Major Themes, with Special Focus on The Writings of Timur Kuran." *Disertasi* (Inggris: Department of Theology School of Historical Studies The University of Birmingham, 1999)
- Chamid, Abdul. "Ekonomi Islam Dalam Pandangan Masyarakat Non-Muslim: Tinjauan Epistemologi, Teologis dan Empiris." *Jurnal Bisnis Net Volume*: 7, No. 2 Desember, (2024).
- Chapra, M. Umer. *Towards A Just Monetary System*. (Leicester: The Islamic Foundation, 1985).
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikatif*. (Malang: Literasi Nusantara, 2020).
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- <https://www.lboro.ac.uk/schools/business-school/our-eople/emeritus/john-resley/#tab1>, 1 Februari 2025.
- <https://www.lboro.ac.uk/schools/business-school/our-eople/emeritus/john-resley/#tab1>, 1 Februari 2025
- M.N, Siddiqi "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature", in *Studies of Islamic Economics*, K. Ahmad (ed.), International Centre for Research in Islamic Economics and The Islamic Foundation, (1980)
- Maisel S. j. *Risk and Capital Adequacy in Commercial Banks, National Bureau of Economic Research*, (Chicago University Press, 1981).
- R. Presley, John and John G. Sessions. "Islamic Economics: The Emergence of A New Paradigm." *The Economic Journal Vol.* 104, No. 424 (May, 1994)
- R. Presley, John dan A. J. Westaway. Review of *Towards a Just Monetary System*, by M. Umer Chapra. *JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 2, pp. 109-115 (1410 A.H./1990 A.D.).
- R. Presley, John R. *Directory of Islamic Financial Institution*. (London: Routledge, 1998).
- S. Mills, Paul and John R. Presley. *Islamic Finance: Theory and Practice*. (London: Macmillan Press, 1999).
- Saqr, M. A. (ed.). *Al-Iqtisad al-Islami*. (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1980).